

AGLOMERASI, PERUBAHAN SOSIAL EKONOMI, DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JAKARTA

(*Agglomeration, Socio-Economic Changes, and Development Policy of Jakarta*)

Ariesy Tri Mauleny

P3DI Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik
Gedung Nusantara 1, Lantai 2, Setjen DPR RI
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Pusat, 10270
E-mail: ariesytleny@gmail.com

Naskah diterima: 9 Februari 2014

Naskah direvisi: 10 November 2015

Naskah diterbitkan: 20 Desember 2015

Abstract

The fusion of development between Jakarta and its surrounding areas naturally starts from agglomeration which is boosted by spatial concentration from economic activities covering aspects of spatial zoning, community level, and scales of city and region. This research is aimed to find out the progress and correlation between agglomeration, growth, and socio-economic changes that occur in Jakarta. The approach used is fixed effect panel data regression estimation method using data from city/regency administration in Jakarta from 2008-2013. The result shows that production agglomeration has significant and positive impact on economic growth but negative on poverty rate and Human Development Index (HDI). On the other hand, population agglomeration has significant and negative impact on economic growth and poverty rate but positive on HDI. Cities/regencies that have positive fixed effect cross signs towards socio-economic development are South, East, Central, and West Jakarta, meanwhile North Jakarta and Kepulauan Seribu regency show negative sign. The concept of "Megapolitan" area (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, and Cianjur) is expected to become solution to the problem faced by Jakarta such as flooding, congestion, waste, and other spatial issues. Accelerate coordination to handle regional strategic issues which can improve economic performance overall and expand the impact of equitable development that must be done. Development of transportation system to support economic, social, and cultural activities, improvement of quality of road, development of mass transportation, and enhancement the capacity of local government in order to management of urbanization and control spatial and regions, may become alternative solutions that can be done.

Keywords: agglomeration, socio-economic, development, Jakarta

Abstrak

Perpaduan pembangunan Jakarta dan daerah sekitarnya secara alami berawal dari aglomerasi yang didorong oleh konsentrasi spasial dari aktivitas ekonomi yang meliputi aspek ruang, tingkat komunitas, skala kota, dan kawasan. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan dan keterkaitan antara aglomerasi, pertumbuhan, dan perubahan sosial ekonomi yang terjadi di Jakarta. Pendekatan yang digunakan adalah metode estimasi regresi data panel *fixed effect* menggunakan data kota/kabupaten administrasi di Jakarta tahun 2008-2013. Hasil penelitian menunjukkan aglomerasi produksi berpengaruh nyata dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi namun negatif terhadap tingkat kemiskinan dan IPM. Sementara aglomerasi penduduk berpengaruh nyata dan negatif bagi pertumbuhan dan tingkat kemiskinan namun positif terhadap IPM. Kota/kabupaten yang memiliki tanda *fixed effect cross* positif terhadap perkembangan sosial ekonomi adalah Jaksel, Jaktim, Jakpus, dan Jakbar, sementara Jakut dan Kepulauan Seribu menunjukkan tanda negatif. Rancangan kawasan megapolitan Jabodetabekjur diharapkan menjadi solusi bagi permasalahan Jakarta seperti banjir, kemacetan dan sampah, serta permasalahan tata ruang lainnya. Mempercepat koordinasi untuk penanganan isu-isu strategis daerah yang dapat meningkatkan kinerja perekonomian secara keseluruhan dan memperluas dampak pemerataan pembangunan, harus segera dilakukan. Pengembangan sistem transportasi yang menunjang aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya, perbaikan kualitas jalan, pengembangan angkutan umum massal, serta peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam pengendalian urbanisasi dan pengelolaan tata ruang dan wilayah, menjadi alternatif solusi yang dapat dilakukan.

Kata kunci: aglomerasi, sosial ekonomi, pembangunan, Jakarta

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat berkembang mengikuti tahapannya. Perkembangan manusia, ditandai bertambahnya penduduk, mendorong peningkatan kebutuhan hidup, baik jumlah dan jenisnya. Peningkatan produksi berbagai jenis barang dan jasa dengan memperbesar kapasitas produksi maupun memperluas cakupan jenis kegiatan sektoral dalam suatu wilayah menyebabkan wilayah bertumbuh. Pertumbuhan wilayah terus berkembang sesuai aktivitas ekonomi yang dilakukan akan menjadi pendorong terwujudnya suatu kota.

Jakarta berkembang menjadi kota metropolitan dengan pertumbuhan terpesat sedunia. Jakarta sebagai pusat perekonomian, bisnis, keuangan, industri perdagangan, bahkan sebagai pusat kegiatan politik, sosial, budaya, dan seni. Jakarta juga menjadi pusat berbagai kegiatan internasional (*pull factors*). Dominasi (*urban primacy*) pertumbuhan Jakarta ditunjukkan secara sangat nyata dengan berkembangnya Jakarta sebagai magnet bagi wilayah sekitarnya (Kuncoro, 2012).

Pertumbuhan Jakarta menggembirakan di satu sisi, namun mengkhawatirkan pada sisi lainnya.

Semakin lebarnya disparitas antara Jakarta dan daerah lainnya yang menjadi faktor pendorong bagi para migran pencari kerja untuk meninggalkan daerahnya (*push factors*). Perkembangan penduduk di Jakarta disebabkan tingginya migrasi dari luar wilayah ke Jakarta. Bahkan pada tahun 2025 diperkirakan tingkat urbanisasi di Jakarta sudah di atas 80 persen.

Pesatnya pertumbuhan gedung pencakar langit menandai pesatnya pertumbuhan Jakarta. Hanya dalam jangka waktu 3 tahun (tahun 2009-2012), pertumbuhan gedung pencakar langit mencapai 87,5 persen. Pada tahun 2009, gedung pencakar langit (*skyscraper*) ada 40 unit dan pertumbuhannya meningkat menjadi 75 unit. Pertumbuhan gedung pencakar langit tersebut diperuntukkan penggunaannya bagi perkantoran, kondominium, dan hotel. Pada tahun 2020 diperkirakan jumlah gedung pencakar langit di Jakarta akan mencapai 250 unit. Pada saat yang sama, diperkirakan gedung tertinggi nomor lima di dunia *The Signature* (638 meter) akan terdapat di Jakarta (Investor Daily Indonesia, 2012).

Beberapa tahun terakhir, dunia menghadapi perubahan cuaca yang sangat ekstrem. Ketika musim hujan datang, Jakarta dihadapkan pada permasalahan rapuhnya daya dukung lingkungan sehingga banjir musiman dan genangan air masih menjadi ancaman tahunan. Permasalahan yang datang hampir setiap tahun tersebut disebabkan lemahnya sistem drainase. Fakta menunjukkan bahwa hujan ringan dapat melumpuhkan Jakarta akibat genangan air dan kemacetan yang ditimbulkan. Begitu pun ketika musim kemarau datang, Jakarta kembali dihadapkan pada persoalan kelangkaan air. Di akhir penghujung tahun 2015, Jakarta memperlihatkan ketidakmampuannya dalam mengelola sampahnya sendiri sehingga menimbulkan ketegangan dengan masyarakat Bekasi yang mendesak Jakarta agar tidak buang sampah ke Bantargebang semua (Kompas.com, 2015).

Implikasi kebijakan dalam konteks percepatan pembangunan menunjukkan bahwa pertimbangan kemampuan adaptasi masyarakat terhadap perubahan sosial ekonomi maupun perubahan daya dukung lingkungan dalam batas tertentu telah terabaikan. Dampak negatif pembangunan untuk mengejar pertumbuhan seringkali dianggap bukan persoalan hari ini, karena baru terjadi beberapa waktu ke depan. Padahal pertumbuhan akan mendorong perekonomian menuju batasnya (Suprpto, 2011). Saat ini pertumbuhan ekonomi Jakarta mulai dirasakan melambat sejak tiga tahun terakhir (BPS DKI Jakarta, 2014).

Berdasarkan fakta tersebut, kiranya menarik untuk mengkaji bagaimana aglomerasi Jakarta -dibatasi aglomerasi penduduk dan aglomerasi produksi- memengaruhi pertumbuhan dan perubahan sosial ekonomi. Setelah itu, digambarkan juga bagaimana kebijakan pembangunan Jakarta yang berjalan selama ini dan apa dampaknya. Deskripsi dan analisis empiris yang dilakukan dibatasi untuk Jakarta sebagai pusat perekonomian dengan lima kota dan satu kabupaten administratif. Hasil dan analisis yang diperoleh diharapkan dapat memberikan gambaran kondisi ke depan dan rekomendasi kebijakan pembangunan yang dapat dilakukan.

B. Permasalahan

Jakarta yang bermula dari sebuah bandar kecil di muara Sungai Ciliwung mulai menunjukkan perkembangan penduduk dan peningkatan produksi yang pesat karena proses aglomerasi yang terus berjalan. Jakarta tumbuh sebagai kota terbesar di Indonesia dengan jumlah penduduk sebanyak 9.603.417 jiwa yang menempati luas wilayah hanya 664,01 km². Jumlah ini hampir sama dengan jumlah penduduk Provinsi Lampung yang memiliki luas wilayah 34.623,80 km² (Kementerian Dalam Negeri, 2013).

Pesatnya pertumbuhan Jakarta menjadikannya sebagai kota metropolitan yang menjadi magnet bagi daerah sekitarnya. Jakarta menjadi daerah dengan nilai produktivitas tertinggi dengan indikator nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan jumlah penduduknya. Tentu saja peningkatan konsentrasi nilai produksi (aglomerasi produksi) dan peningkatan konsentrasi jumlah penduduk (aglomerasi penduduk), tidak bisa dilepaskan dari perubahan sosial ekonomi yang terjadi di dalamnya. Perubahan konsentrasi tersebut bukan saja melahirkan masalah tata ruang dan lingkungan hidup bagi Jakarta tetapi juga permasalahan sosial ekonomi lainnya.

Sekitar 40 persen dari luasan DKI merupakan dataran rendah yang ketinggiannya berada 1 sampai 1,5 meter di bawah muka air laut pasang. Pada tahun 2013, total area terendam banjir seluas 5 ha dengan perkiraan kerugian langsung mencapai Rp117 miliar (Muadzin, 2014). Kemacetan juga menjadi keseharian penduduk Jakarta. Kerugian akibat kemacetan ditaksir mencapai Rp46 triliun/tahun setara dengan 92 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jakarta. Kemacetan ini terus diperparah setiap tahunnya karena penambahan panjang jalan hanya 0,01 persen per tahun sementara penambahan kendaraan mencapai 11 persen per tahun (Ibrahimy, 2011). Kepadatan penduduk Jakarta juga berdampak pada menurunnya daya dukung

dan kualitas lingkungan karena pencemaran yang ditimbulkan. Disebutkan bahwa sekitar 60 persen air tanah Jakarta dalam kondisi tercemar (BPLHD Pemprov DKI Jakarta, 2013).

Bagaimana aglomerasi produksi dan penduduk memengaruhi pertumbuhan ekonomi dan perubahan sosial Jakarta? Bagaimana kebijakan pembangunan yang telah berjalan memengaruhi perubahan sosial ekonomi masyarakat? Bagaimana upaya pemerintah dalam mengatasinya? Perkembangan sosial ekonomi diwakili oleh tingkat kemiskinan, pengangguran, dan indeks pembangunan manusia (IPM) sebagai aspek sosial. Aspek ekonomi diwakili oleh pendapatan per kapita.

C. Tujuan

Kajian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan dan keterkaitan antara variabel aglomerasi, pertumbuhan, dan perubahan sosial ekonomi yang terjadi di Jakarta. Kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang kebijakan pembangunan dan gambaran perkembangan Jakarta berikut segenap permasalahan. Kajian juga diarahkan untuk memberikan gambaran bagaimana kebijakan pembangunan yang dapat dilakukan untuk Jakarta ke depan dalam mewujudkan ekonomi lokal, kota, dan kawasan yang lebih baik.

II. KERANGKA TEORI

A. Pengertian Aglomerasi

Teori penghematan aglomerasi dan teori ukuran kota yang optimal menggambarkan ekuilibrium konfigurasi spasial dari aktivitas ekonomi sebagai hasil tarik-menarik antara kekuatan sentripetal dengan sentrifugal. Kekuatan sentripetal ditunjukkan oleh penghematan aglomerasi adalah semua aktivitas ekonomi termasuk industri ke daerah perkotaan. Kekuatan sentrifugal adalah kebalikan dari kekuatan sentripetal, yaitu kekuatan dispersi. Perkembangan kota sangat berkorelasi dengan perkembangan infrastruktur dan fasilitas yang ada (Kuncoro, 2012).

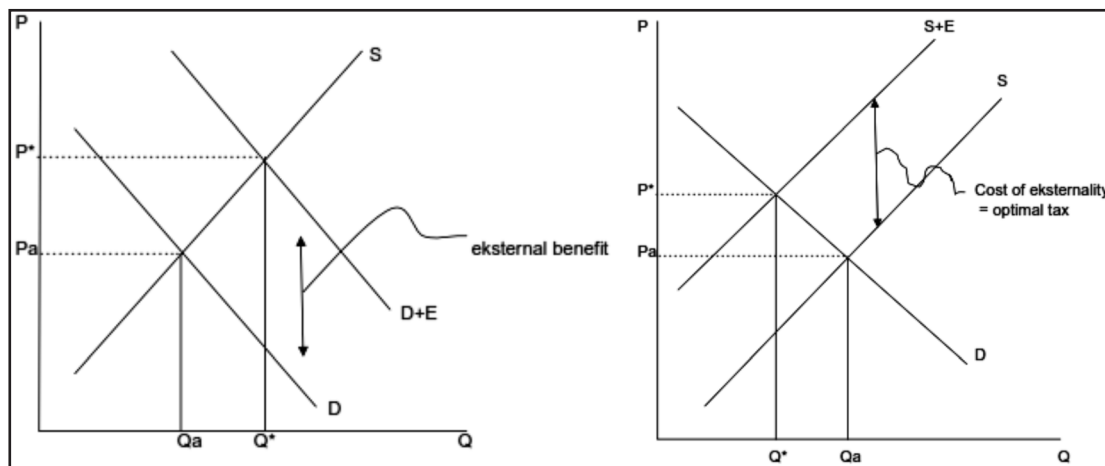
Montgomery dalam Kuncoro (2012) mendefinisikan aglomerasi sebagai konsentrasi spasial dari aktivitas ekonomi di kawasan perkotaan dalam rangka penghematan karena lokasinya yang berdekatan (*economies of proximity*). Hal ini diasosiasikan dengan kluster spasial dari perusahaan, para pekerja, dan konsumen. Perspektif klasik memercayai bahwa aglomerasi merupakan suatu bentuk spasial dan diasosiasikan dengan konsep penghematan melalui konsep eksternalitas untuk mengestimasi besarnya skala ekonomis. Para ahli ekonomi perkotaan mendefinisikan kota sebagai hasil dari produksi aglomerasi secara spasial.

Aglomerasi yang menghasilkan kluster-kluster akan meningkatkan arus urbanisasi. Hal ini dipengaruhi banyaknya pasokan tenaga kerja di satu sisi. Sementara, lapangan kerja yang tersedia tidak memadai dan persebarannya tidak merata diseluruh daerah di sisi lain. Terkonsentrasinya suatu kegiatan ekonomi di suatu daerah akan menyebabkan daerah itu mengalami perkembangan yang jauh lebih tinggi dibandingkan daerah-daerah disekitarnya. Apabila pengaruh tersebut menyebar ke beberapa kota di sekitarnya, maka akan menghasilkan fenomena kota yang berbeda wilayah administrasinya menjadi sama dalam corak dan fungsi wilayahnya. Jika diproses dan direncanakan lebih lanjut, hal ini akan menghasilkan sebuah kota yang lebih besar lagi yang merupakan gabungan dari beberapa kota yang disebut megapolitan (Kim, 1999).

Penghitungan variabel aglomerasi dapat dilakukan dengan beberapa cara, di antaranya dengan menggunakan proporsi penduduk maupun proporsi produksi. Penelitian Widarjono (1999) yang menggunakan proporsi penduduk menunjukkan terdapat hubungan kausalitas antara pertumbuhan penduduk dengan pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, Suryaningrum (2000) menyatakan aglomerasi sebagai proporsi jumlah penduduk perkotaan (*urban area*) terhadap jumlah penduduk di provinsi tersebut. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Bonet dalam Sigalingging (2008), ukuran aglomerasi menggunakan dua pendekatan, yaitu aglomerasi penduduk di mana proporsi jumlah penduduk perkotaan dalam suatu provinsi terhadap jumlah penduduk provinsi tersebut, atau menggunakan konsep aglomerasi produksi yang diukur menggunakan proporsi PDRB sub daerah/wilayah terhadap PDRB daerah tersebut. Begitu juga yang dilakukan oleh Sandhika (2011) untuk Kabupaten Kendal dan menunjukkan hubungan yang signifikan. Sementara penelitian Sihombing (2008) juga menunjukkan hubungan positif antara variabel aglomerasi dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Demak, meskipun hasilnya tidak signifikan.

B. Pandangan Neo-Klasik dan Eksternalitas

Pandangan neo-klasik dengan teori yang dikembangkan Robert Solow menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi bergantung pada pertumbuhan faktor-faktor produksi, yaitu jumlah penduduk, tenaga kerja, akumulasi kapital, dan tingkat kemajuan teknologi. Penduduk menjadi salah satu faktor penting karena penduduk memberikan kontribusi dalam penyediaan tenaga kerja dari yang berkualifikasi ahli sampai tenaga buruh. Penduduk merupakan unsur penting dalam usaha meningkatkan produksi dan mengembangkan kegiatan ekonomi



a. Dampak Eksternalitas Positif

b. Dampak Eksternalitas Negatif

Sumber: David Hyman, 2011.

Gambar 1. Perbedaan Dampak Eksternalitas Positif dan Negatif

karena penawaran dan permintaan berperan penting dalam menentukan *output* suatu perekonomian.

Peningkatan jumlah penduduk erat kaitannya dengan bertambahnya aktivitas kegiatan perekonomian yang memunculkan eksternalitas. Eksternalitas terjadi ketika aktivitas kesatuan ekonomi memengaruhi utilitas kesatuan ekonomi yang lain dan terjadi di luar mekanisme pasar (*non-market mechanism*). Eksternalitas dapat memengaruhi efisiensi ekonomi ketika tidak dapat ditransmisikan melalui mekanisme harga pasar. Eksternalitas bisa muncul sebagai konsekuensi dari ketidakmampuan seseorang/institusi/negara untuk membuat suatu *property right* (Nicholson, 2008).

Eksternalitas juga dapat diartikan sebagai biaya, manfaat atau dampak dari suatu transaksi ekonomi yang tidak direfleksikan dalam penghitungan biaya dan penetapan harga. Ketika terjadi eksternalitas, pihak ketiga selain pembeli dan penjual suatu barang dipengaruhi oleh produksi dan konsumsinya. Biaya atau manfaat dari pihak ketiga tersebut tidak dipertimbangkan, baik oleh pembeli maupun penjual suatu barang yang memproduksi atau yang menggunakan produk sehingga menghasilkan eksternalitas. Akibatnya harga pasar yang terjadi tidak secara akurat menggambarkan *marginal social cost* maupun *marginal social benefit* (Hyman, 2011).

Terdapat dua kategori utama dari teori eksternalitas. *Pertama*, eksternalitas didefinisikan berdasarkan efek atau dampak yang ditimbulkan dan yang *kedua* mendefinisikan eksternalitas berdasarkan faktor penyebab dan konsekuensinya. Eksternalitas ditinjau dari segi dampaknya terbagi menjadi dua, yaitu eksternalitas negatif dan eksternalitas positif (Gambar 1).

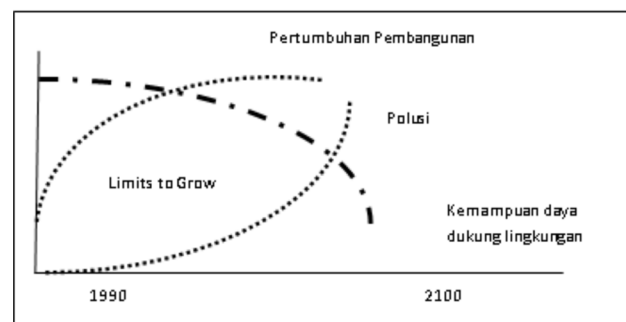
C. Perubahan Paradigma Pertumbuhan Ekonomi

Terdapat perubahan paradigma pertumbuhan

ekonomi yang mempertimbangkan pada keberlakuan tiga unsur utama dalam proses pembangunan. *Pertama*, kesejahteraan manusia sedang terancam oleh degradasi lingkungan dan penyusutan sumber daya alam. *Kedua*, kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh penyimpangan/kegagalan ekonomi, terutama yang bersumber dari pasar. *Ketiga*, solusi kerusakan lingkungan harus mengoreksi unsur-unsur ekonomi sebagai penyebabnya (Pearce dalam Munandar, 2000).

Terbitnya *"The Limits to Growth"* mendorong lahirnya pemikiran tentang pembangunan berkelanjutan. Jika pertumbuhan ekonomi dan konsumsi sumber daya alam (SDA) tetap mengikuti proses yang ada, maka SDA akan terkuras habis dan lingkungan menjadi rusak sehingga rentan bencana dan akan memengaruhi pertumbuhan ekonomi (Gambar 2).

Pembangunan ekonomi regional merupakan produk sekaligus proses dalam mencapai kesejahteraan ekonomi di suatu wilayah. Dikatakan produk, karena hasil yang diperoleh dapat diukur melalui penciptaan lapangan pekerjaan, pendapatan, investasi, standar hidup, dan kondisi lingkungan kerja di suatu wilayah di mana orang-orang dapat hidup dan bekerja dengan baik. Sedangkan proses merupakan fakta dari keadaan dan



Sumber: Meadows dalam Suryanto, 2009.

Gambar 2. Model *Limits to Grow*

fenomena yang sedang berlangsung dalam mencapai ukuran-ukuran tersebut sehingga kesejahteraan setiap orang akan meningkat dari waktu ke waktu (Stimson, Stough, Roger, and Brown, 2002).

Untuk memahami dan mengevaluasi pembangunan ekonomi wilayah dan pembangunan fisik diperlukan kerangka dasar analisis pertumbuhan wilayah dan lokasi pusat perekonomian secara komprehensif. Analisis tersebut menggunakan tiga asumsi yaitu (1) pertumbuhan wilayah secara *overall* (volume kegiatan ekonomi) ditentukan oleh kondisi bermacam-macam faktor lain selain pendapatan regional per kapita (aspek kesejahteraan dan pertumbuhan), (2) pembangunan masa depan adalah hasil dari kegiatan dan keputusan masa lalu dan sekarang, dan (3) bahwa faktor-faktor kritis dalam pola pertumbuhan wilayah yang terus berubah adalah hasil keputusan agen-agen ekonomi dalam mengefisienkan lokasi dan *output*.

III. METODOLOGI

Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif mengacu pada regresi data panel. Data statistik yang digunakan adalah seluruh wilayah kota/kabupaten administratif yang ada di Jakarta meliputi PDRB sektoral, jumlah penduduk, angkatan kerja, tingkat pengangguran, kemiskinan, dan IPM dari tahun 2008 sampai tahun 2012.

Penggunaan regresi data panel memungkinkan untuk dapat mengangkat karakteristik antarindividu dan antarwaktu yang bisa saja berbeda-beda. Data panel adalah suatu set observasi yang terdiri dari beberapa individu pada periode tertentu. Observasi tersebut merupakan pasangan y_{it} dengan x_{it} di mana i menunjukkan individu, t menunjukkan waktu dan j menunjukkan variabel bebas (Ekananda, 2014). Spesifikasi model regresi data panel adalah sebagai berikut:

$$Y_{it} = a_i + b_i X_{jit} + c_{it} \\ t = 1, 2, \dots, T \quad i = 1, 2, \dots, N \quad \text{dan } j = 1, 2, \dots, K \quad \dots \dots \dots (1)$$

Berdasarkan penelitian Suryaningrum (2000) dengan menggunakan model Robert Solow diketahui bahwa tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti PDRB, aglomerasi, modal, tenaga kerja, IPM, dan kepadatan penduduk. Aglomerasi dinyatakan sebagai proporsi jumlah penduduk perkotaan terhadap jumlah penduduk provinsi tersebut (Sigalingging, 2008).

Sementara itu, penelitian Bonet (2008) dalam Riandoko dan Sugianto (2013), menyebutkan bahwa aglomerasi dapat diukur dengan menggunakan proporsi jumlah penduduk perkotaan dalam suatu provinsi terhadap jumlah penduduk provinsi tersebut (aglomerasi penduduk). Atau menggunakan konsep aglomerasi produksi yang diukur dengan proporsi PDRB sub daerah/wilayah terhadap PDRB daerah/

provinsi. Hasil penelitian Bonet menunjukkan bahwa antaraglomerasi produksi dan ketimpangan pendapatan regional terdapat hubungan positif dan signifikan pada $\alpha = 1$ persen.

Widarjono (1999) mengatakan bahwa penduduk relatif berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi regional suatu daerah. Pengaruh relatif tersebut tergantung pada bagaimana penduduk yang berada di wilayah tersebut apakah bekerja secara efisien atau tidak.

Sementara penelitian mengenai aglomerasi dan kemiskinan perkotaan dilakukan oleh Siagian (2005). Aglomerasi program dan aktivitas pembangunan mengakibatkan beberapa wilayah tumbuh sangat dinamis sementara daerah lainnya berjalan lamban. Selain itu spesifikasi pembangunan yang dilakukan di kota besar didominasi oleh aktivitas yang hanya dapat diberikan oleh kelompok masyarakat tertentu yang terbilang modern. Dengan demikian, gerak para migran yang didominasi kaum marginal tidak mendapat sambutan dari lembaga pengguna tenaga kerja yang ada di perkotaan (Siagian, 2005).

Berdasarkan penelitian sebelumnya, analisis pengaruh variabel aglomerasi dan perubahan sosial ekonomi pada perkembangan Jakarta dilakukan melalui tiga indikator yaitu tingkat pertumbuhan, kemiskinan, dan IPM. Pada masing-masing indikator perubahan sosial ekonomi tersebut dilakukan tiga tahapan. Pada tahapan pertama menggunakan variabel aglomerasi penduduk dan aglomerasi produksi. Tahapan selanjutnya menambahkan variabel angkatan kerja dan pengangguran. Tahap terakhir menambahkan kembali variabel kemiskinan dan pertumbuhan.

Indikator Pertumbuhan:

$$PTBH_{it} = \alpha + \beta_1 AgPDRB_{it} + \beta_2 AgPDK_{it} \dots \dots \dots (1)$$

$$PTBH_{it} = \alpha + \beta_1 AgPDRB_{it} + \beta_2 AgPDK_{it} + \beta_3 TPAK_{it} + \beta_4 TPT_{it} \dots (2)$$

$$PTBH_{it} = \alpha + \beta_1 AgPDRB_{it} + \beta_2 AgPDK_{it} + \beta_3 TPAK_{it} + \beta_4 TPT_{it} + \beta_5 PVT_{it} + \beta_6 IPM_{it} \dots \dots \dots (3)$$

Indikator Kemiskinan:

$$PVT_{it} = \alpha + \beta_1 AgPDRB_{it} + \beta_2 AgPDK_{it} \dots \dots \dots (4)$$

$$PVT_{it} = \alpha + \beta_1 AgPDRB_{it} + \beta_2 AgPDK_{it} + \beta_3 TPAK_{it} + \beta_4 TPT_{it} \dots \dots (5)$$

$$PVT_{it} = \alpha + \beta_1 AgPDRB_{it} + \beta_2 AgPDK_{it} + \beta_3 TPAK_{it} + \beta_4 TPT_{it} + \beta_5 PTBH_{it} + \beta_6 IPM_{it} \dots \dots \dots (6)$$

Indikator IPM:

$$IPM_{it} = \alpha + \beta_1 AgPDRB_{it} + \beta_2 AgPDK_{it} \dots \dots \dots (7)$$

$$IPM_{it} = \alpha + \beta_1 AgPDRB_{it} + \beta_2 AgPDK_{it} + \beta_3 TPAK_{it} + \beta_4 TPT_{it} \dots \dots (8)$$

$$IPM_{it} = \alpha + \beta_1 AgPDRB_{it} + \beta_2 AgPDK_{it} + \beta_3 TPAK_{it} + \beta_4 TPT_{it} + \beta_5 PVT_{it} + \beta_6 PTBH_{it} \dots \dots \dots (9)$$

Keterangan:

PTBH : Pertumbuhan Ekonomi.

AgPDRB_i : Aglomerasi Produksi adalah perbandingan PDRB sub daerah/wilayah dengan PDRB daerah/provinsinya.

AgPDK : Aglomerasi Penduduk adalah perbandingan jumlah penduduk suatu sub daerah/wilayah dengan jumlah penduduk daerah/provinsinya.

TPAK : Angkatan Kerja.

TPT : Tingkat Pengangguran.

PVT : Tingkat Kemiskinan.

IPM : Indeks Pembangunan Manusia.

Selanjutnya hasil regresi dianalisis dengan mengungkapkan fakta, keadaan, fenomena, dan kondisi yang terjadi. Fenomena yang ada digunakan untuk mengetahui perkembangan dan pengaruh dari variabel aglomerasi yang digunakan terhadap pertumbuhan dan perubahan sosial ekonomi.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Perekonomian Jakarta

Kota di sebuah negara mendominasi aktivitas perekonomian secara keseluruhan. Kota dapat dipandang sebagai mesin pertumbuhan ekonomi (*engine of economic growth*) dalam perekonomian modern karena dapat menyediakan komoditas perkotaan yang sangat penting yaitu informasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Perkotaan adalah suatu wilayah yang memenuhi tiga persyaratan yaitu kepadatan penduduk melebihi 500 orang, jumlah rumah tangga yang bekerja di sektor pertanian kurang dari 25 persen dan memiliki minimal delapan jenis fasilitas perkotaan. Jakarta memenuhi keseluruhan unsur tersebut untuk menjadi mesin pertumbuhan yang menjadi magnet bagi daerah sekitarnya (Hariani, 2014).

Jumlah penduduk Jakarta mencapai lebih dari 9,9 juta jiwa. Wilayah paling luas dan penduduk terbanyak

Tabel 1. Luas Wilayah, Penduduk, dan Kepadatan Penduduk

No.	Kabupaten/Kota	Luas (km ²)	Penduduk (jiwa)	Kepadatan penduduk (jiwa/km ²)
1.	Kota Jakarta Timur (Jaktim)	188	2.693.896	14.598
2.	Kota Jakarta Utara (Jakut)	147	1.645.659	11.221
3.	Kota Jakarta Selatan (Jaksel)	141	2.058.318	14.598
4.	Kota Jakarta Barat (Jakbar)	130	2.281.945	17.615
5.	Kota Jakarta Pusat (Jakpus)	48	902.973	18.761
6.	Kabupaten Kep. Seribu	9	21.082	2.423
	Provinsi DKI Jakarta	664	9.607.787	13.158

Sumber: BPS DKI Jakarta, 2013b.

berada di Jakarta Timur, dengan penduduk mencapai 2,6 juta jiwa. Sedangkan kepadatan penduduk tertinggi yaitu mencapai lebih dari 18.000 jiwa per km² terdapat di Jakpus yang memiliki luas wilayah hanya 48 km² tetapi penduduknya mencapai 900 ribu jiwa (Tabel 1).

Struktur perekonomian Jakarta yang diukur dengan PDRB menurut sektoral (lapangan usaha) didominasi oleh sektor tersier sehingga Jakarta disebut sebagai Kota Jasa. Selama tahun 2010-2014, rata-rata besaran PDRB atas dasar harga berlaku per tahun di DKI Jakarta adalah Rp1.395,5 triliun. Bila dibandingkan dengan total PDRB seluruh Indonesia berada pada kisaran 16 persen. Dengan kontribusi tersebut, perkembangan perekonomian Jakarta akan cukup memengaruhi perekonomian nasional. Bila lapangan usaha dikelompokkan dalam 3 sektor utama maka sektor tersier masih menjadi andalan dengan rata-rata kontribusi 71,70 persen selama tahun 2010-2014, diikuti sektor sekunder 27,91 persen dan 0,39 persen.

Distribusi PDRB menurut pengeluaran tahun 2013 terbesar pada komponen konsumsi rumah tangga dengan kontribusi 57,56 persen, meningkat bila dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 56,88 persen. Kontribusi terbesar kedua pada komponen ekspor sebesar 54,57 persen. Komponen ini pun mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 56,19 persen. Sedangkan kontribusi terkecil pada komponen konsumsi pemerintah sebesar 9,79 persen (Tabel 2).

Pada bulan Maret 2013, garis kemiskinan di DKI Jakarta mencapai angka di atas 400 ribu per kapita yaitu Rp407.437. Selama kurun waktu tahun 2010-2013 penduduk miskin di DKI Jakarta menunjukkan tren meningkat. Dibandingkan kemiskinan di tahun 2010, angka kemiskinan tahun 2013 naik 0,07 poin menjadi 3,55 persen atau mencapai 354.190 orang. Dimensi

Tabel 2. Distribusi PDRB Menurut Pengeluaran Tahun 2010-2013 Berdasarkan Atas Harga Berlaku

Komponen Pengeluaran	2012		2013	
	Rp Miliar	Persen	Rp Miliar	Persen
Konsumsi RT	627.134,94	56,88	722.944,64	57,56
Konsumsi Pemerintah	106.134,94	9,62	122.986,94	9,79
PMTB + Perubahan Stok	426.812,14	38,67	474.865,94	37,81
Ekspor	620.131,70	56,19	685.382,11	54,57
Minus Impor	677.163,40	61,35	750.253,85	59,74
PDRB	1.103.692,66	100,00	1.255.925,78	100,00

Keterangan: PMTB: Pembentukan Modal Tetap Bruto.

Sumber: BPS DKI Jakarta, 2014.

Tabel 3. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Jakarta Tahun 2010-2013

Uraian	2010	2011	2012	2013
Jumlah Penduduk Miskin (000 orang)	312,2	363,4	363,2	354,9
Persentase Penduduk Miskin (Persen)	3,48	3,75	3,69	3,55
Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	331.169	355.450	379.052	407.437
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	0,45	0,60	0,50	0,63
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,11	0,15	0,13	0,17

Sumber: BPS DKI Jakarta, 2014.

lain dari kemiskinan adalah tingkat kedalaman (P1) dan keparahan kemiskinan (P2). Kedua angka indeks tersebut menunjukkan kenaikan bahkan tertinggi selama periode tahun 2010-2013. Kenaikan nilai kedua indeks ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin menjauhi garis kemiskinan, serta ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin melebar. Kebanyakan penduduk miskin Jakarta mendiami perkampungan padat penduduk di pinggiran kota maupun di bantaran kali atau waduk (Tabel 3).

Produktivitas tenaga kerja meningkat tajam bahkan pada tahun 2012 merupakan yang tertinggi selama kurun waktu tahun 2010-2012. Sektor konstruksi berperan penting yaitu sekitar 11 persen dengan laju pertumbuhan dalam kisaran 6,2-7,2 persen selama kurun waktu tahun 2009-2011. Dalam kurun waktu tahun 2010-2012 terjadi kenaikan jumlah hotel sebesar 11,4 persen dari 351 hotel menjadi 392 hotel di Jakarta. Selain itu, kota Jakarta juga menjadi kota dengan mal terbanyak di dunia. Jumlah pusat belanja atau mal yang ada di Jakarta mencapai 170 lebih dan telah melebihi batas ideal dari jumlah penduduknya (Metro news, 2014).

Tabel 4. Jumlah Hotel di Jakarta Tahun 2010-2012

Uraian	2010	2011	2012
Hotel Bintang	165	173	178
Hotel NonBintang	186	202	214

Sumber: BPS DKI Jakarta, 2013b.

Tabel 5. Produktivitas Tenaga Kerja Harian di Jakarta Tahun 2009-2011

Uraian	2009	2010	2011
Produktivitas (Rp juta)	297	903	1.059
Tenaga kerja harian lepas (ribu orang hari)	55.513	79.049	95.513
Proporsi pengeluaran dan pendapatan bruto	77,55	59,19	64,19

Sumber: BPS, DKI Jakarta, 2013a.

Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), menetapkan penduduk DKI Jakarta hanya boleh mencapai 12,5 juta orang pada tahun 2030. Sementara berdasarkan hasil sensus tahun 2013, populasi penduduk Jakarta sudah mencapai 9,9 juta jiwa, ditambah warga luar yang beraktivitas di Jakarta pada siang hari sebanyak 2,5 juta. Dengan begitu di siang hari jumlahnya sudah mendekati populasi yang diperbolehkan yaitu 12,5 juta jiwa. Padahal jumlah itu diperkirakan dicapai tahun 2030.

B. Hasil Dugaan Regresi Data Panel

Dengan adanya perbedaan karakteristik dari daerah pembentuk Jakarta, baik kota administratif maupun kabupaten administratif, dilakukan beberapa simulasi regresi data panel untuk diperoleh hubungan dan besaran pengaruh dari variabel perubahan sosial ekonomi Jakarta. Hasil regresi data panel perubahan sosial ekonomi Jakarta secara keseluruhan sesuai Tabel 7, 8, dan 9 adalah sebagai berikut:

(a). Pertumbuhan Ekonomi:

$$PTBH = 0,041056 + 0,765775 \text{ AgPDRB}_{it} + (-0,611763) \text{ AgPDK}_{it}$$

(b). Tingkat Kemiskinan:

$$PVT = 7,62068 + (-8,516876) \text{ AgPDRB}_{it} + (-5,333203) \text{ AgPDK}_{it}$$

(c). Indeks Pembangunan Manusia:

$$IPM = 77,30102 + (-2,494239) \text{ AgPDRB}_{it} + 3,652122 \text{ AgPDK}_{it}$$

Dari hasil regresi terlihat bahwa aglomerasi produksi dan aglomerasi penduduk memberikan pengaruh dengan signifikansi sebesar 5 persen pada pengujian indikator sosial yaitu tingkat kemiskinan dan IPM maupun pada pengujian indikator ekonomi yaitu pertumbuhan. Namun demikian, pengaruh yang diberikan berbeda. Aglomerasi produksi memberikan pengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi dan pengaruh negatif pada tingkat kemiskinan dan IPM. Sementara untuk aglomerasi penduduk, memberikan pengaruh negatif pada pengujian pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan, sementara untuk pengujian IPM terlihat aglomerasi penduduk berpengaruh positif.

PDRB secara keseluruhan memberikan pengaruh positif pada perubahan ekonomi yang diwakili pertumbuhan maupun berpengaruh dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Sektor mana saja yang memberikan pengaruh dapat dilihat pada Tabel 6. Terlihat bahwa dugaan hasil regresi data panel terhadap variabel terikat tingkat kemiskinan, IPM, dan pendapatan per kapita. Kemampuan model menjelaskan variabel secara keseluruhan berbeda-beda. Model pengujian

Tabel 6. Dugaan Hasil Regresi Data Panel PDRB Sektoral pada Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan, dan IPM

Variabel	Pertumbuhan	Kemiskinan	IPM
Konstanta	0,107681* 0,0899	15,63278** 0,0242	442,4892** 0,0472
Pertanian, Peternakan, Kehutanan, Perikanan	-0,469960 0,5541	-44,86034*** 0,0065	-1574,613*** 0,0007
Industri Pengolahan	1,455940* 0,0678	-1,760829 0,8993	-403,9399 0,2756
Listrik, Gas, Air Bersih	0,295429 0,9278	-38,01292 0,5294	-730,7278 0,6424
Konstruksi	-2,456337 0,5581	33,86753 0,6606	1773,166 0,3830
Perdagangan, Hotel, Restoran	1,232623** 0,0364	17,56908* 0,0731	936,0341 0,7448
Pengangkutan dan Komunikasi	0,580405 0,7039	5,126251 0,8553	108,6859 0,8822
Kuangan, Real Estate, Jasa Perusahaan	-1,340529 0,7062	-1,320817 0,9839	-1077,748 0,5306
Jasa-Jasa	0,456688* 0,0834	-32,53060** 0,0325	-1234,237 0,1744
R ²	0,846589	0,993235	0,696248
Adj R ²	0,721942	0,987738	0,44945
<i>Fixed Effect Cross</i>			
Jaksel	0,674647	-3,712048	39,57691
Jaktim	-0,196828	-1,193302	49,42889
Jakbar	0,079243	-2,614414	-39,78714
Jakpus	0,491059	-6,366329	99,62428
Jakut	-1,024235	9,267778	-39,85807
Kep. Seribu	-0,023886	4,618316	-108,9849

Keterangan: * : signifikansi 10 persen; ** : signifikansi 5 persen; ***: signifikansi 1 persen.

Sumber : Hasil regresi data panel.

tingkat kemiskinan mampu menjelaskan variabel secara keseluruhan sebesar 99 persen. Sementara untuk pengujian pertumbuhan ekonomi sebesar 84 persen dan pengujian IPM sebesar 69 persen.

Pada pengujian pertumbuhan ekonomi, sektor yang memberikan pengaruh positif mulai dari yang terbesar diberikan oleh sektor industri pengolahan; kemudian sektor perdagangan, hotel dan restoran; dan diikuti oleh sektor pengangkutan dan komunikasi; sektor jasa; dan sektor listrik dan air. Sementara sektor yang berpengaruh negatif dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi mulai dari yang terbesar diberikan oleh sektor konstruksi; sektor keuangan; *real estate*; dan jasa perusahaan; serta terakhir sektor pertanian.

Pemerintah seharusnya memberikan dukungan kebijakan pada pengembangan industri pengolahan karena berpengaruh nyata dengan signifikansi 5 persen dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sementara pemerintah harus mengkaji ulang kebijakan pengembangan sektor konstruksi yang secara nyata mengurangi tingkat pertumbuhan ekonomi. Ketika sektor konstruksi diberikan ruang kebijakan dan kemudahan perizinan yang luas, maka yang berkontribusi adalah investasi asing. Begitu juga dengan sektor keuangan, *real estate*, dan jasa perusahaan. Ditambah lagi, kebijakan pembangunan sektor konstruksi juga belum mempertimbangkan kemampuan dan daya dukung lahan, padahal khusus di Jakarta sektor konstruksi dan sektor keuangan, *real estate*, dan jasa perusahaan adalah yang paling bertanggung jawab dalam perubahan struktur kota dan tata ruang.

Sementara itu, sektor primer yaitu pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan, memberikan pengaruh negatif karena pada dasarnya sektor ini tidak dapat dikembangkan secara bebas di wilayah Jaksel, Jakbar, dan Jakpus yang memberikan tanda *fixed effect cross* positif. Namun demikian sektor primer ini masih bisa dikembangkan pada daerah Jaktim, Jakut, dan Kepulauan Seribu atau daerah yang memberikan tanda *fixed effect cross* negatif.

Sementara untuk hasil dugaan regresi tingkat kemiskinan, terlihat bahwa sektor yang dapat mengurangi kemiskinan adalah sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan, diikuti oleh sektor listrik, gas dan air bersih serta sektor industri pengolahan. Hal ini dapat disebabkan karena kontributor sektor tersebut sebagian besar adalah kelas marjinal. Pemerintah selanjutnya membuat terobosan kebijakan dengan memberikan dukungan atau alih fungsi pada pembangunan sektor tersebut disesuaikan dengan tanda positif atau negatif pada *fixed effect cross*-nya karena berpengaruh secara nyata mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pengurangan jumlah orang miskin, bukan hanya dengan menyiapkan perangkat kebijakan yang dapat 'memaksa' orang miskin meninggalkan Jakarta dan menggantinya dengan kesempatan migrasi untuk tenaga kerja berkeahlian khusus baik dari dalam maupun luar negeri. Kebijakan pembangunan yang diarahkan pada penguatan sektor primer akan berdampak positif bagi pemenuhan kebutuhan pangan bagi wilayah Jakarta. Pemerintah selanjutnya mulai memprioritaskan kembali pembangunan sektor primer pada daerah dengan nilai *fixed effect cross* positif terhadap kemiskinan yaitu Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu sementara daerah lainnya bernilai negatif. Sektor primer yang layak dikembangkan adalah perikanan sesuai dengan struktur ekonominya.

(a) Indikator Pertumbuhan Ekonomi

Tabel 7 memperlihatkan dugaan hasil regresi data panel terhadap variabel terikat pertumbuhan ekonomi. Terlihat bahwa variabel aglomerasi produksi secara nyata meningkatkan pertumbuhan sementara aglomerasi penduduk secara nyata mengurangi

Tabel 7. Dugaan Hasil Regresi Data Panel untuk Pertumbuhan Ekonomi

Variabel	Pertumbuhan		
Konstanta	0,041056 0,0703	0,035690 0,8024	-0,158717 0,5592
AgProduksi	0,765775** 0,0163	0,753890** 0,0186	0,883711** 0,0148
AgPenduduk	-0,611763** 0,0159	-0,598022** 0,0359	-0,307219* 0,0795
TPAK		-0,000229 0,8365	0,002515 0,6385
IPM		0,000275 0,5429	0,000156 0,8973
TPT			0,000245 0,6843
Kemiskinan			0,013675** 0,0386
R ²	0,719189	0,726633	0,740414
Adj R ²	0,629840	0,603618	0,581779
<i>Fixed Effect Cross</i>			
Jaksel	0,012277	0,009940	0,022510
Jaktim	0,093062	0,089575	0,086734
Jakbar	0,063877	0,061880	0,075038
Jakpus	-0,070455	-0,069650	-0,035978
Jakut	-0,074597	-0,072450	-0,099700
Kep. Seribu	-0,024165	-0,019295	-0,048603

Keterangan: * : signifikansi 10 persen; ** : signifikansi 5 persen; *** : signifikansi 1 persen.

Sumber : Hasil regresi data panel.

pertumbuhan. Variabel yang secara signifikan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi ditunjukkan oleh tanda bintang, yaitu aglomerasi produksi, aglomerasi penduduk, dan kemiskinan. Aglomerasi produksi dan kemiskinan memberikan pengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi, sementara aglomerasi penduduk memberikan pengaruh negatif.

Analisis mengenai peningkatan jumlah penduduk di Jakarta yang ditunjukkan dengan pengaruh negatif atau dapat mengurangi jumlah orang miskin dapat dijelaskan dengan teori aglomerasi penduduk. Jakarta diuntungkan dengan semakin banyaknya penduduk dengan keterampilan khusus bermigrasi ke Jakarta, sementara penduduk dengan keterampilan minim akan semakin banyak yang meninggalkan Jakarta dan berpindah ke wilayah-wilayah pinggiran Jakarta atau daerah sekitar Jakarta yang mayoritasnya adalah penduduk marjinal baik miskin atau hampir miskin seperti Jakut dan Kepulauan Seribu. Untuk itu diperlukan peran pemerintah yang lebih besar bagi pengembangan wilayah Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu.

Pada analisis *fixed effect cross*, terlihat bahwa daerah yang memberikan pengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi adalah Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Jakarta Barat. Sementara daerah Jakarta Pusat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu memberikan pengaruh negatif. Hal ini menunjukkan bahwa perlu dikaji ulang kebijakan pembangunan yang selama ini berjalan di daerah Jakarta Pusat, Jakarta Utara maupun Kepulauan Seribu.

(b) Indikator Tingkat Kemiskinan

Tabel 8 memperlihatkan dugaan hasil regresi pada pengujian tingkat kemiskinan di mana aglomerasi produksi maupun aglomerasi penduduk keduanya menunjukkan hasil berpengaruh nyata negatif dengan signifikansi 10 persen. Bahkan ketika menambahkan variabel uji lainnya, kedua variabel tersebut baik aglomerasi produksi maupun aglomerasi penduduk keduanya menunjukkan pengaruh lebih besar dibandingkan variabel uji lainnya seperti angkatan kerja maupun IPM. Namun untuk penambahan variabel pertumbuhan menunjukkan pengaruh nyata positif dengan signifikansi 10 persen. Artinya semakin tinggi pertumbuhan, maka tingkat kemiskinan di Jakarta akan semakin meningkat untuk wilayah Jakut dan Kepulauan Seribu.

Kualitas lapangan kerja yang tercipta selama kurun waktu tahun 2007-2011 di DKI Jakarta relatif menurun. Tenaga kerja yang bekerja di sektor informal dimungkinkan mengalami peningkatan, baik yang bekerja sendiri maupun dibantu dengan anggota keluarga. Rendahnya kualitas lapangan kerja dan tingginya kemiskinan daerah menjadi salah satu

Tabel 8. Dugaan Hasil Regresi Data Panel untuk Tingkat Kemiskinan

Variabel	Kemiskinan		
	Konstanta	7,620680*** 0,0006	29,70937*** 0,0008
AgProduksi	-8,516876** 0,0304	-9,362371** 0,0248	-12,25719 0,1419
AgPenduduk	-5,333203* 0,0624	-4,110137** 0,0476	-8,682317 0,4138
Angkatan Kerja		-0,003581** 0,0485	-0,002761** 0,018017
IPM		-0,282680** 0,0133	-0,261579** 0,0201
Pengangguran			-0,072536* 0,2269
Pertumbuhan			3,967805** 0,0212
R ²	0,988306	0,992750	0,993868
Adj R ²	0,984585	0,989488	0,990120
<i>Fixed Effect Cross</i>			
Jaksel	-1,326885	-0,806532	-0,671869
Jaktim	-1,697281	-1,419883	-0,943252
Jakbar	-1,825352	-1,540707	-1,430897
Jakpus	-1,647741	-1,282266	-1,423285
Jakut	1,597449	1,795828	2,116486
Kep. Seribu	4,899810	3,253560	2,352816

Keterangan: * : signifikansi 10 persen; ** : signifikansi 5 persen; *** : signifikansi 1 persen.

Sumber : Hasil regresi data panel.

penyebab dari rendahnya PDRB/kapita. Ini bisa dilihat dari jumlah pekerja informal, yaitu pekerja yang terhitung bekerja namun menghadapi ketidakpastian yang tinggi sehingga sangat rentan terhadap sedikit guncangan ekonomi yang terjadi. Upaya yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kualitas lapangan kerja adalah dengan memperluas kesempatan kerja formal, memperlancar perpindahan pekerja dari pekerjaan yang produktivitasnya rendah ke pekerjaan yang produktivitasnya tinggi, dan mempertahankan serta meningkatkan kesejahteraan pekerja yang masih berada di sektor informal dan mempersempit kesenjangan upah pada tingkat produktivitas yang sama (Bappenas, 2014).

(c) Indikator Indeks Pembangunan Manusia

Nilai *fixed effect cross* pada pengujian yang hanya melibatkan variabel aglomerasi produksi

maupun aglomerasi penduduk menunjukkan bahwa pengaruh positif dalam pembangunan manusia secara berurutan dari yang terbesar diberikan oleh Jaksel, Jakpus, Jaktim, Jakbar, dan terakhir Jakut dengan nilai yang jauh lebih kecil dari rata-ratanya. Sementara Kepulauan Seribu justru menunjukkan pengaruh negatif. Sebagaimana dijelaskan dalam gambaran perekonomian Jakarta sebelumnya di mana perbedaan struktur ekonomi dan pengisian tenaga kerja yang ada di masing-masing daerah akan membedakan kemampuan setiap daerah dalam proses pembangunan. Struktur ekonomi Jaksel, Jakpus, Jaktim, Jakbar, dan Jakut didominasi oleh sektor sekunder dan tersier serta posisinya yang dekat dengan pusat pemerintahan membuat kemampuan daerah beradaptasi secara ekonomi dan sosial menjadi lebih baik, hal ini ditunjukkan dengan nilai *fixed effect cross* yang negatif untuk prevalensi kemiskinan dan dugaan regresi positif untuk peningkatan indeks pembangunan manusia. Sementara untuk Kepulauan Seribu menunjukkan dugaan hasil regresi yang berkebalikan.

Tabel 9. Dugaan Hasil Regresi Data Panel untuk Indeks Pembangunan Manusia

Variabel	IPM		
	Konstanta	77,30102*** 0,0000	67,77648*** 0,0000
AgProduksi	-2,494239* 0,0913	1,439066 0,9320	-11,69761 0,4870
AgPenduduk	3,652122* 0,0815	7,947895 0,7238	-2,709406 0,8979
Angkatan Kerja		0,102441 0,0042	0,072634** 0,0313
Pengangguran		0,102814 0,4178	0,002028 0,9866
Kemiskinan			-1,014466** 0,0201
Pertumbuhan			4,452506 0,4842
R ²	0,931686	0,956693	0,968197
Adj R ²	0,909950	0,937205	0,948762
<i>Fixed Effect Cross</i>			
Jaksel	1,903476	2,099285	0,856012
Jaktim	1,102238	0,859177	-0,364752
Jakbar	1,050732	0,862446	-0,845123
Jakpus	1,212219	1,112352	-0,597289
Jakut	0,574557	-0,517981	1,796609
Kep. Seribu	-5,843222	-4,415279	-0,845457

Keterangan: * : signifikansi 10 persen; ** : signifikansi 5 persen; *** : signifikansi 1 persen.

Sumber : Hasil regresi data panel.

Terdapat hal yang menarik pada pengujian pertama ketika aglomerasi produksi justru mengurangi IPM Jakarta secara keseluruhan. Anomali ini dapat disebabkan karena tenaga kerja yang digunakan bukan berasal dari penduduk Jakarta tetapi menggunakan tenaga terampil dan keahlian dari luar. Sementara bagi penduduk Jakarta belum mendapatkan porsi yang cukup dalam perluasan lapangan pekerjaan dan pengembangan diri. Hal yang berbeda ditunjukkan justru oleh tanda *fixed effect cross* daerah Kepulauan Seribu karena aglomerasi produksi akan meningkatkan IPM.

C. Kebijakan Pembangunan Jakarta: Tantangan dan Harapan

Efek aglomerasi industri yang terjadi pada tahun 1980an, memang sangat menguntungkan bagi pelaku-pelaku industri dan aktivitas ekonomi itu sendiri. Penghematan biaya produksi dan distribusi menjadi pertimbangan mengingat Indonesia masih memiliki kekurangan dalam hal sebaran atau pemerataan kesejahteraan penduduk.

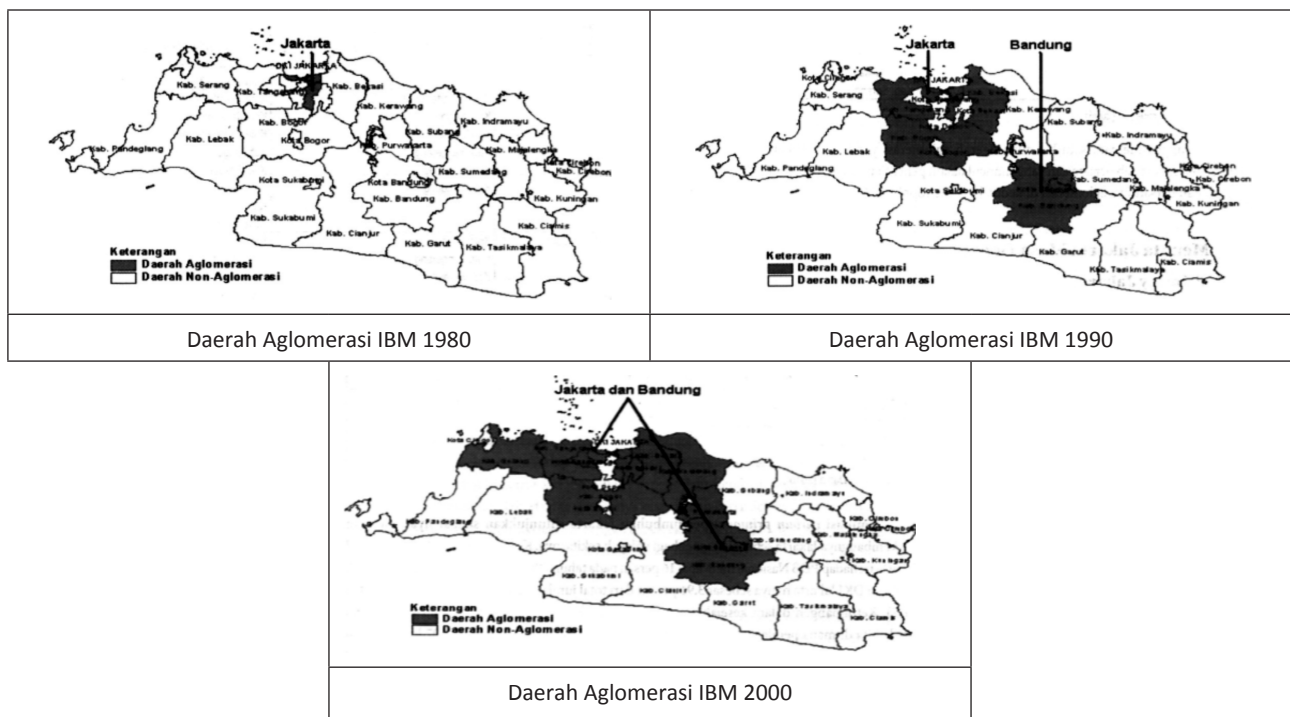
Awalnya, aglomerasi industri berada di daerah Jaktim dan Jakut. Pada satu dekade kemudian, daerah aglomerasi meluas ke daerah-daerah sekitar metropolitan utama yaitu Jaksel dan Jakpus dan sering disebut *extended metropolitan region*. Daerah-daerah aglomerasi industri pada kelanjutannya menyebar sampai Jakbar, Bogor, Bekasi, Tangerang, serta Depok, dan Cianjur.

Kuncoro dan Hidayati *dalam* Kuncoro (2012) menunjukkan pola distribusi IBM di DKI Jakarta dan

Jawa Barat pada tiga tahun pengamatan (tahun 1980, 1990, dan 2000) berdasarkan jumlah tenaga kerja dan nilai tambah yang dihasilkan sektor industri besar manufaktur (IBM). Hasil identifikasi dan klasifikasi menunjukkan bahwa pada tahun 1980 hanya ada dua daerah yang jumlah tenaga kerja lebih dari 45.000 orang dan nilai tambahnya lebih dari Rp200 miliar, yaitu Jakut dan Jaktim sehingga dapat ditentukan bahwa kedua daerah tersebut adalah daerah aglomerasi yang pertama kali muncul (daerah aglomerasi ditandai dengan warna lebih gelap pada Gambar 3).

Pada satu dekade kemudian, daerah aglomerasi meluas tidak hanya ke daerah metropolitan utama tetapi juga daerah-daerah di sekitarnya yang sering disebut *extended metropolitan region* yaitu Jakarta Barat, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bandung, dan Kota Bandung. Kemudian pada tahun 2000, daerah aglomerasi semakin bertambah menjadi 13 daerah dan membentuk suatu koridor atau jaringan kota (*network cities*) yang menghubungkan aglomerasi di *Greater Jakarta* dan Bandung sehingga menjadi satu kesatuan daerah aglomerasi yang besar (Kuncoro, 2014).

Perkembangan dan dinamika aglomerasi yang terjadi dalam koridor *Greater Jakarta* dan Bandung menjadi daya tarik tersendiri bagi terjadinya migrasi penduduk. Model migrasi Harris Todaro yang sudah dikembangkan sejak tahun 1970an menjelaskan fenomena perpindahan penduduk yang umumnya terjadi di daerah sedang berkembang di mana terdapat tendensi penduduk pindah dari daerah perdesaan ke



Sumber: Kuncoro dan Hidayati *dalam* Kuncoro, 2012.

Gambar 3. Daerah Aglomerasi di Pulau Jawa Tahun 1980, 1990, dan 2000

daerah perkotaan (*rural-urban migration*) walaupun tingkat pengangguran sudah cukup tinggi di daerah perkotaan tersebut. Model ini juga memperlihatkan bahwa perbedaan upah buruh antara desa dan kota juga merupakan salah satu faktor utama yang menentukan kecenderungan untuk melakukan migrasi tersebut. Selain itu, pola hidup daerah perkotaan yang lebih modern merupakan daya tarik yang cukup besar untuk pindah (Sjafrizal, 2012).

Ketersediaan pertukaran bahan baku dan pasar secara lebih dekat sehingga produksi dapat dilakukan dengan skala lebih efisien, penurunan biaya transportasi, penggunaan fasilitas bersama sampai dengan penggunaan tenaga kerja yang lebih efisien sehingga dapat menurunkan biaya produksi menjadi keuntungan terjadinya aglomerasi. Pergeseran Jakarta dari daerah pinggiran Sungai Ciliwung kini berubah menjadi kota metropolitan terpadat penduduknya adalah hasil dari proses aglomerasi ekonomi. Proses keuntungan komperatif, spesialisasi produksi, dan keuntungan skala besar juga terus berlanjut, menjadikan pesatnya pertumbuhan Jakarta.

Pesatnya pertumbuhan Jakarta menyisihkan eksternalitas dinamis yang seharusnya dapat dicermati sejak awal sehingga dapat diantisipasi. Pembangunan pusat belanja di Jakarta dengan dalih memenuhi kebutuhan konsumen, sebenarnya telah melebihi batas ideal dari jumlah penduduknya. Pembangunan apartemen dan hunian mewah di berbagai lokasi menjadi persoalan tersendiri. Belum lagi banyaknya daya dukung sektor informal yang memadati ruang-ruang publik. Hal inilah yang menyebabkan perubahan tata ruang. Daerah resapan air, ruang hijau, dan fungsi taman kota berubah menjadi mal dan apartemen. Sementara bantaran sungai, pinggiran kali, dan daerah cekungan berubah menjadi perkampungan kumuh dan padat penduduknya (Adisasmita, 2014).

Banyak kawasan yang seharusnya menjadi daerah resapan air dan ruang terbuka hijau berubah menjadi kawasan bisnis. Barang lingkungan tidak ada harganya dan dinilai secara tidak wajar. Harga seringkali tidak mencerminkan nilai seluruh barang sumber daya yang digunakan di dalam perolehannya. Harga tanah yang dibeli pengembang untuk pembangunan gedung pencakar langit, belum memasukkan nilai kerusakan resapan air yang hilang, tidak memperhitungkan penurunan muka tanah yang terjadi bahkan juga hilangnya sumber daya hayati yang bermanfaat.

Kepadatan penduduk harus dikelola dengan cerdas memanfaatkan aspek teknologi. Masyarakat kelas menengah yang menetap di pinggiran Jakarta merupakan modal manusia harus lebih diberdayakan dan ditarik ke dalam kota melalui pemberian subsidi penyediaan rumah susun yang dilengkapi dengan zona biru dan hijau. Membersihkan hunian di pinggiran-pinggiran sungai dan

bantaran-bantaran sungai serta membatasi urbanisasi dengan penetapan regulasi dan pajak.

Pembersihan hunian di pinggiran-pinggiran sungai dan di tempat publik harus dilakukan dengan pendekatan psikologis dan etika kenegaraan. Dengan pemberian pemahaman yang baik tentang arti pentingnya tata ruang dan daya dukung lingkungan serta diikuti pemberian kepastian kehidupan yang lebih baik akan mempermudah proses perbaikan tata ruang wilayah. Pada dasarnya masyarakat menyadari kesalahan telah menempati ruang publik namun tidak punya pilihan lain. Tuntutan ekonomi, harus tinggal dekat sumber pekerjaan, dan upaya mencari sumber kehidupan, menjadi alasannya, sesuai dengan teori lokasi oleh Weber (Colell, *et al*, 1995).

Perlu dikembangkan industri yang bernilai tambah tinggi dengan kebutuhan tenaga kerja yang lebih berkemampuan. Perusahaan turut bertanggung jawab dan perlu memfasilitasi permukiman pekerjaannya sehingga dapat mengurangi eksternalitas negatif, baik kemacetan maupun penyalahgunaan ruang publik. Solusi permukiman pekerja ini menjadi satu dan terintegrasi dengan perbaikan lingkungan kota. Seperti membangun hunian bagi pekerja di atas tepian Waduk Pluit adalah langkah strategis untuk memperbaiki dan melindungi waduk tersebut dari kerusakan dan pendudukan di masa depan.

Dalam kerangka ini, pabrik yang ada di Jakarta dan sekitarnya pun perlu ditata, limbahnya harus dikelola, akses dari dan kepadanya diperbaiki terhadap permukiman. Pemerintahan juga perlu mengerahkan aparatnya untuk mencegah penyalahgunaan ruang publik lebih lanjut.

Tantangan terbesar bagi perubahan sosial ekonomi Jakarta adalah tingginya kepadatan penduduk terutama pada pagi dan sore hari yang mencapai 12,5 juta orang akibat banyaknya orang yang masuk ke Jakarta dari Depok, Bekasi, Bogor, Tangerang, dan kawasan sekitar Jakarta untuk mencari penghidupan. Hal ini memicu berbagai permasalahan terutama kemacetan dan ketidakseimbangan pemanfaatan ruang dan fasilitas publik. Pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara penyediaan lapangan pekerjaan terutama di sepanjang lingkaran luar Jakarta sehingga mempermudah akses antara tenaga kerja dan lingkungan kerja.

Selain itu, tingginya tingkat investasi perlu diselaraskan dengan pemanfaatan lahan dan daya dukung lingkungan. Besarnya investasi menjadi tidak bermanfaat ketika ditujukan hanya untuk memperbesar keuntungan dan tidak sesuai dengan kebutuhan Jakarta. Investasi dari luar harus disikapi bijaksana, dengan menjaga nilai-nilai kemanusiaan dan nasionalisme.

Apalagi kemiskinan masih menjadi persoalan hari ini bagi Jakarta. Setiap tahun angkanya semakin

meningkat karena tingginya harga barang dan jasa di Jakarta. Hal ini diperparah dengan masih lemahnya fasilitas dan prasarana publik yang disediakan pemerintah. Transportasi masih menjadi barang yang mahal. Saat ini, masyarakat mencari jawaban atas permasalahan Jakarta dengan caranya sendiri. Munculnya Gojek, Grabbike, Grabtaxi, Ubercar, dan Uberblack sebagai sarana transportasi alternatif di samping taksi yang telah lama ada menjadi bukti. Pemerintah harus membuat sarana transportasi publik yang memadai dan disesuaikan dengan desain tata kota yang ada untuk mengurai kemacetan dan penyalahgunaan ruang dan fasilitas publik.

Pendidikan sebagai sarana mencerdaskan anak bangsa dan pendorong bagi perubahan sosial ekonomi masyarakat masih menjadi barang mewah bagi masyarakat bawah. Pendidikan gratis yang menjadi salah satu kebijakan pemerintah, belum dapat dinikmati masyarakat bawah karena kesulitan memperoleh SMPN dan SMAN karena rendahnya nilai ujian nasional. Akibatnya mayoritas masyarakat bawah kesulitan melanjutkan studinya ke jenjang pendidikan lebih tinggi. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Jakarta pada periode selanjutnya, baik pengangguran maupun kriminalitas. Penyelenggaraan Kartu Jakarta Pintar juga harus diawasi pemanfaatan dan pengelolannya agar terjaga akuntabilitasnya.

Fenomena ketimpangan pendapatan dan kesenjangan ekonomi di Jakarta sangat besar. Namun sejauh ini belum ada upaya yang sistematis, terencana, dan serius untuk mengurangi kesenjangan ekonomi. Seolah kesenjangan ekonomi bersifat alamiah dan sesuai permintaan pasar.

Berdasarkan hasil perhitungan, tantangan bagi Pemerintah Jakarta untuk masing-masing kabupaten/kota memerlukan pendekatan dan prioritas yang berbeda. Untuk Jakbar, Jakut, dan Jakpus di mana pertumbuhan ekonomi tinggi tetapi peningkatan IPM di bawah rata-rata perlu menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan peningkatan mutu pelayanan publik terutama bidang pendidikan dan kesehatan. Untuk Jaksel dan Jaktim pemerintah tetap perlu menjaga momentum pertumbuhan dan meningkatkan produktivitas serta nilai tambah, sekaligus juga mempertahankan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik di bidang pendidikan dan kesehatan. Sementara untuk Kepulauan Seribu, pemerintah perlu mendorong percepatan pembangunan ekonomi yang menggunakan sumber daya lokal seperti kelautan, perikanan, pertanian, dan perdagangan serta jasa.

D. Rencana ke Depan

Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur yang menjadi penyangga bersama Jakarta diwacanakan menjadi kawasan megapolitan.

Megapolitan menggambarkan perkembangan wilayah perkotaan yang sangat pesat. Jakarta bersama kawasan penyangganya dilihat sebagai satu kesatuan karena terjadi interaksi keseharian yang intensif. Jabodetabekjur merupakan konsentrasi utama kawasan perkotaan di Indonesia di mana 20 persen dari jumlah penduduk perkotaan berada di kawasan tersebut.

Di Indonesia, landasan konsep megapolitan sebenarnya telah ada, yaitu pasal 227 ayat 3c dan PP No. 47/1997 tentang RTRWN pasal 5 ayat 2c. Jadi, pertimbangan yuridis untuk pembentukan megapolitan sudah ada, namun yang terpenting adalah bagaimana pencapaian konsep megapolitan ini dan bagaimana juga pengaruhnya terhadap masyarakat mengingat Indonesia adalah negara yang masih mengandalkan pembangunan berdasarkan pertumbuhan ekonomi.

Pada tahun 2000, jumlah penduduk di Jabodetabekjur telah mencapai 13,7 juta jiwa. Sepuluh tahun kemudian, jumlah penduduk meningkat lebih dari 100 persen menjadi 28,8 juta jiwa. Besaran tersebut menjadikan Jabodetabekjur digolongkan ke dalam kelompok 10 kota besar di dunia. Pada tahun 2013, jumlah penduduk di Jakarta sebesar 9,9 juta jiwa dengan luas wilayah hanya sebesar 661,62 m². Jika ditambah dengan masyarakat *commuter*, maka jumlah penduduknya mencapai lebih dari 13 juta jiwa. Besaran tersebut menjadikan Jakarta memenuhi syarat bagi terbentuknya kota megapolitan (Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan, 2015).

Wacana daerah megapolitan di Indonesia merupakan suatu bagian dari dampak aktivitas ekonomi pada daerah maju yang berpengaruh. Walaupun masih sekadar wacana, hal ini sudah mampu memberikan suatu pemahaman tentang dampak kegiatan ekonomi dalam hal ini adalah industri yang tidak hanya pada aspek ekonomi itu sendiri tetapi sampai pada aspek pemerintahan dan administrasi wilayah. Walaupun konsep megapolitan belum terwujud, namun efek dari proses menuju hal itu sudah mulai terlihat yakni adanya kemungkinan kenaikan harga yang sangat drastis akibat dari persaingan oleh pelaku-pelaku industri tertentu.

Sebagai ibu kota negara, seharusnya Jakarta telah mengalami transformasi menjadi kota jasa modern yang mampu menciptakan kegiatan produktif yang bernilai tambah tinggi. Pemerintah bisa secara aktif menawarkan mekanisme insentif agar pabrik-pabrik yang bernilai tambah rendah bersedia keluar Jakarta secara sukarela.

Pembangunan seharusnya tidak lagi menempatkan Jakarta sebagai pusat segala kegiatan ekonomi, tetapi secara aktif memperluas basis kegiatan ekonomi ke luar Jakarta, mulai dari daerah di sekitarnya hingga ke daerah yang semakin jauh. Dengan semakin memperluas dan memodernisasi

sistem transportasi, akan memperlancar terbentuknya kawasan bisnis yang tersebar di pinggiran Jakarta dan di daerah sekitarnya, dan bukan sekedar mengutamakan kelancaran arus manusia masuk ke pusat kota.

Dengan demikian warga Jakarta memperoleh insentif untuk berpindah dari kawasan padat dan kumuh ke kawasan pemukiman baru yang dibangun secara terpadu. Sudah sepatutnya dilakukan revitalisasi infrastruktur jalur kereta api yang sudah ada di Jakarta sehingga akan tercipta sentra-sentra bisnis yang lebih tersebar, sehingga lebih cepat mendorong efek penularan ke daerah yang semakin jauh dari Jakarta.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan di atas, Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menggagas RUU mengenai Pengelolaan Terpadu Kawasan Megapolitan Jabodetabekjur. Pembentukan kawasan Jabodetabekjur diharapkan dapat mengatasi permasalahan kota yang terjadi saat ini seperti banjir, kemacetan, dan tata air. Biaya yang dikeluarkan masyarakat di Jakarta dan sekitarnya menjadi mahal, baik biaya operasional kendaraan akibat macet, biaya kesehatan akibat polusi hingga biaya untuk mengatasi tingkat stress masyarakat yang semakin tinggi.

Dalam rancangan pengelolaan terpadu Jabodetabekjur, akan dilakukan pembagian pelayanan kota-kota di mana Jakarta sebagai kota inti dan kota lainnya menjadi kota satelit. Pemanfaatan ruang Jakarta diarahkan untuk perumahan hunian dengan kepadatan tinggi, perdagangan dan jasa skala nasional dan internasional, dan industri ringan nonpolutan dan khusus di Pantura sebagian untuk perumahan dengan Koefisien Dasar Bangunan sebesar 40-50 persen.

Sedangkan untuk kota satelit, seperti Kota Tangerang, Bekasi, Depok, dan Bogor diarahkan untuk permukiman tinggi (apartemen dan perumahan susun) dan sebagian rendah. Sementara untuk perdagangan dititikberatkan pada skala nasional. Industri yang dikembangkan industri ringan, menyerap banyak tenaga kerja dan berorientasi pasar. Pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan agrobisnis juga bisa dikembangkan di kota-kota satelit ini.

Kabupaten yang ada, seperti Kabupaten Tangerang dan Bekasi, diarahkan untuk perumahan padat dan rendah, ekonomi skala setempat, industri berorientasi tenaga kerja, ladang, pertanian lahan basah (irigasi teknis) dan kering, perkebunan, perikanan, peternakan, agroindustri hutan produksi, kawasan lindung, dan suaka alam. Untuk Kabupaten Bogor dan Cianjur diarahkan sama dengan Kabupaten Tangerang dan Bekasi hanya untuk perumahan masih berskala sedang/rendah.

V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Pengaruh aglomerasi bagi perubahan sosial ekonomi yang diwakili oleh pertumbuhan ekonomi,

kemiskinan, dan IPM di Jakarta dapat diukur melalui variabel aglomerasi produksi maupun aglomerasi penduduk. Dugaan hasil regresi menunjukkan bahwa aglomerasi produksi maupun aglomerasi penduduk keduanya menunjukkan pengaruh nyata pada perubahan sosial ekonomi Jakarta. Aglomerasi produksi memberikan pengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi dan pengaruh negatif pada tingkat kemiskinan dan IPM. Sementara untuk aglomerasi penduduk, memberikan pengaruh negatif pada pengujian pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan, pengujian IPM memperlihatkan variabel aglomerasi penduduk berpengaruh positif.

Pada pengujian pertumbuhan ekonomi, sektor yang memberikan pengaruh positif mulai dari yang terbesar diberikan oleh sektor industri pengolahan; kemudian sektor perdagangan, hotel dan restoran; dan diikuti oleh sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor jasa dan sektor listrik dan air. Sementara sektor yang berpengaruh negatif dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi mulai dari yang terbesar diberikan oleh sektor konstruksi, sektor keuangan dan *real estate*, dan terakhir sektor pertanian. Dengan demikian, kebijakan pembangunan Jakarta sudah seharusnya tidak lagi mengandalkan pada sektor konstruksi serta sektor keuangan dan *real estate* karena kedua sektor tersebut disinyalir memberikan pengaruh negatif pada peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Nilai *fixed effect cross* pada pengujian yang hanya melibatkan variabel aglomerasi produksi maupun aglomerasi penduduk menunjukkan bahwa pengaruh positif dalam pembangunan manusia secara berurutan dari yang terbesar diberikan oleh Jaksel, Jakpus, Jaktim, Jakbar, dan terakhir Jakut dengan nilai yang jauh lebih kecil dari rata-ratanya. Sementara itu, Kepulauan Seribu justru menunjukkan pengaruh negatif. Dengan demikian, kebijakan pembangunan untuk wilayah Jaksel, Jakpus, Jaktim, Jakbar, Jakut, dan Kepulauan Seribu harus dilaksanakan dengan pendekatan yang berbeda. Pemerintah harus mengedepankan kebijakan pembangunan bagi Kepulauan Seribu melalui peningkatan variabel aglomerasi produksi dan penduduk karena secara nyata meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan. Pemerintah perlu memprioritaskan peningkatan produktivitas dan nilai tambah sektor melalui penguatan sumber daya lokal seperti kelautan, perikanan, pertanian, dan perdagangan dan jasa terutama untuk Kabupaten Kepulauan Seribu.

Pembentukan wilayah terintegrasi megapolitan Jabodetabekjur merupakan langkah strategis bagi sinergitas pertumbuhan antarkota dan pembentukan wilayah yang lebih baik dari sisi perencanaan, tata kota maupun solusi atas beragam permasalahan Jakarta dan sekitarnya, seperti banjir, genangan air, kemacetan, maupun tata air. Selain itu, upaya ini juga sekaligus

mengurangi dampak eksternalitas negatif lainnya yang terjadi sebagai eksekusi perkembangan kota.

B. Saran

Proses aglomerasi pembangunan yang mengakibatkan disparitas desa-kota, penduduk miskin-kaya semakin besar merupakan masalah yang harus diatasi. Masalah ini dapat dieliminasi secara perlahan dengan melakukan kaji ulang terhadap strategi pembangunan dengan segala kebijakan-kebijakan publik dan kebijakan sosial yang mengikutinya. Solusi jangka pendek dapat dilakukan melalui distribusi investasi dan transfer teknologi pada wilayah-wilayah terbelakang sehingga dapat mengejar ketertinggalannya. Dengan demikian, konsentrasi penduduk di suatu wilayah dapat dihindari dan aktivitas ekonomi yang dipicu peningkatan permintaan dapat meningkat.

Pemerintah juga perlu melakukan penanganan isu-isu strategis daerah yang diperkirakan akan dapat meningkatkan kinerja perekonomian daerah secara keseluruhan dan memperluas dampak pemerataan pembangunan. Beberapa hal yang dapat dilakukan misalnya pengembangan sistem transportasi yang menunjang aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya seperti perbaikan kualitas jalan dan pengembangan angkutan umum massal. Termasuk juga peningkatan kapasitas pemerintah kota dalam pengelolaan urbanisasi dan pengendalian tata ruang.

Dalam jangka panjang, pemerintah pusat perlu terus melakukan evaluasi dan perbaikan kebijakan pembangunan yang sudah dilaksanakan di daerah. Langkah ini untuk memastikan bahwa, pembangunan yang dilakukan telah mempertimbangkan nilai ekonomis dari kapasitas dan daya dukung lahan. Pembangunan tidak hanya mengandalkan pada kemudahan memperoleh insentif terutama pada sektor konstruksi serta sektor keuangan dan *real estate*. Pemerintah harus menjamin upaya-upaya preventif menjalankan penegakan hukum yang lebih tegas terhadap kegiatan perekonomian yang tidak ramah lingkungan, perusak barang publik, dan penyalahgunaan lahan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adisasmita, R. (2014). *Pertumbuhan wilayah dan wilayah pertumbuhan*. Jakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Bappenas. (2014). *Seri analisa pembangunan daerah; Perkembangan pembangunan Provinsi DKI Jakarta 2014*. Jakarta: Bappenas.

- BPLHD Pemprov DKI Jakarta. (2013). *Laporan status lingkungan hidup daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013*. Jakarta: Pemprov DKI Jakarta.
- Badan Pusat Statistik DKI Jakarta. (2013a). *Ringkasan eksekutif keadaan angkatan kerja DKI Jakarta 2013*. Jakarta: BPS DKI Jakarta.
- Badan Pusat Statistik DKI Jakarta. (2013b). *Jakarta dalam angka 2013*. Jakarta: BPS DKI Jakarta.
- Colell, A. M., Whinston, M. D., and Green, J. R. (1995). *Microeconomic theory*. New York: Oxford University Press.
- Ekananda, M. (2014). *Analisis ekonometrika data panel* (cet. Pertama). Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media.
- Kementerian Dalam Negeri. (2013). *Buku induk kode dan data wilayah*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
- Kuncoro, M. (2012). *Perencanaan daerah; bagaimana membangun ekonomi lokal, kota, dan kawasan*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Kuncoro, M. (2013). *Mudah memahami dan menganalisis indikator ekonomi*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Sjafrizal. (2012). *Ekonomi wilayah dan perkotaan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Stimson, Stough, R. and Brown, R. (2012). *Regional economics development: Analysis and planning strategy*. Berlin: Springer Verlag.
- Suparmoko. (2012). *Ekonomi sumber daya alam dan lingkungan, suatu pendekatan teoritis* (cet. Ke-4). Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- World Bank. (2014). *Kajian kebijakan pembangunan 2014, Indonesia menghindari perangkap*. Jakarta: The World Bank Office Jakarta.

Artikel dalam Jurnal dan Working Paper

- Ibrahimy, D. (2011). Permasalahan dan solusi bagi urbanisasi dan *over-populasi* di kota megapolitan. Pascasarjana Sosiologi Universitas Airlangga, Semarang.
- Kim, S. R. (1999). Resources, and economic geography: Source of US. regional comparative advantages. *Journal Regional Science and Urban Economics*, 29, 1-32.
- Riandoko, B dan Sugianto, F. X. (2013). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, share sektor industri dan pertanian serta tingkat jumlah orang yang bekerja terhadap ketimpangan wilayah antar kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2002-2010. *Diponegoro Journal of Economics*, 2(1), 1-14.

- Santoso, A. B. dan Prabatmodjo, H. (2012). Aglomerasi industri dan perubahan sosial ekonomi di Kabupaten Bekasi. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, SAPPK ITB, 1(2), 73-82.
- Siagian, M. (2005). Aglomerasi dan kemiskinan perkotaan. *Jurnal Wawasan*, 11(2), 41-46.
- Suprpto. (2011). Statistik pemodelan bencana banjir Indonesia (kejadian 2002-2010). *Jurnal Penanggulangan Bencana*, 2(2), 34-47.
- Suryaningrum, A. 2000. Pertumbuhan ekonomi regional di Indonesia. *Media Ekonomi dan Bisnis Undip Semarang*, 12(1), 8-16.
- Suryanto. (2009). Mampukah PDB hijau mengakomodasi degradasi lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan UMY*, 10(1), 13-24.
- Widarjono, A. (1999). Analisis kausalitas penduduk dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 4(2), 24-30.
- Jakarta, kota dengan mal terbanyak di dunia. Diperoleh tanggal 17 Maret 2014, dari <http://metro.news.viva.co.id/news/read/165684-jumlah-mal-di-jakarta-sudah-tak-ideal>.
- Jakarta, kota dengan pertumbuhan terpesat sedunia. Diperoleh tanggal 29 April 2014, dari <http://www.tempo.co/read/news/2014/04/27/083573662/Jakarta-Kota-dengan-Pertumbuhan-Terpesat-Sedunia>.
- Tinjauan ekonomi dan keuangan daerah Provinsi DKI Jakarta. Diperoleh tanggal 10 Maret 2014, dari <http://www.djpk.depkeu.go.id/attachments/article/257/09.%20DKI%20JAKARTA.pdf>.
- Warga Bekasi desak Jakarta tidak buang sampah ke Bantargebang semua. Diperoleh tanggal 5 November 2015, dari <http://megapolitan.kompas.com/read/2015/11/05/21384811/Warga.Bekasi.Desak.Jakarta.Tidak.Buang.Sampah.ke.Bantargebang.Semua>.
- Sumber Lain**
- BPS DKI Jakarta. (2014). *Berita resmi statistik* No.09/02/31/Th. XVI, 5 Februari 2014, hal. 5. Pertumbuhan ekonomi Jakarta Tahun 2014.
- Dahuri, R. (2014). Banjir Jakarta dan solusinya. *Koran Sindo* 21 Januari 2014.
- Hariani, P. (2014). Analisis konsentrasi ekonomi dan penduduk perkotaan di Indonesia. *Disertasi*. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Sandhika, A. W. (2011). Analisis pengaruh aglomerasi, tenaga kerja, jumlah penduduk, dan modal terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kendal. *Skripsi*. FEB Univ. Diponegoro Semarang.
- Sigalingging, A. J. (2008). Dampak pelaksanaan desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesenjangan wilayah. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi UNDIP, Semarang, 2008.
- Sihombing, K. (2008). Pengaruh aglomerasi, modal, tenaga kerja, dan kepadatan penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Demak. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Undip Semarang.
- Susetyo, D. (2011). Analisis pengaruh tingkat investasi, aglomerasi, tenaga kerja, dan indeks pembangunan manusia terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Tengah. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Undip Semarang.